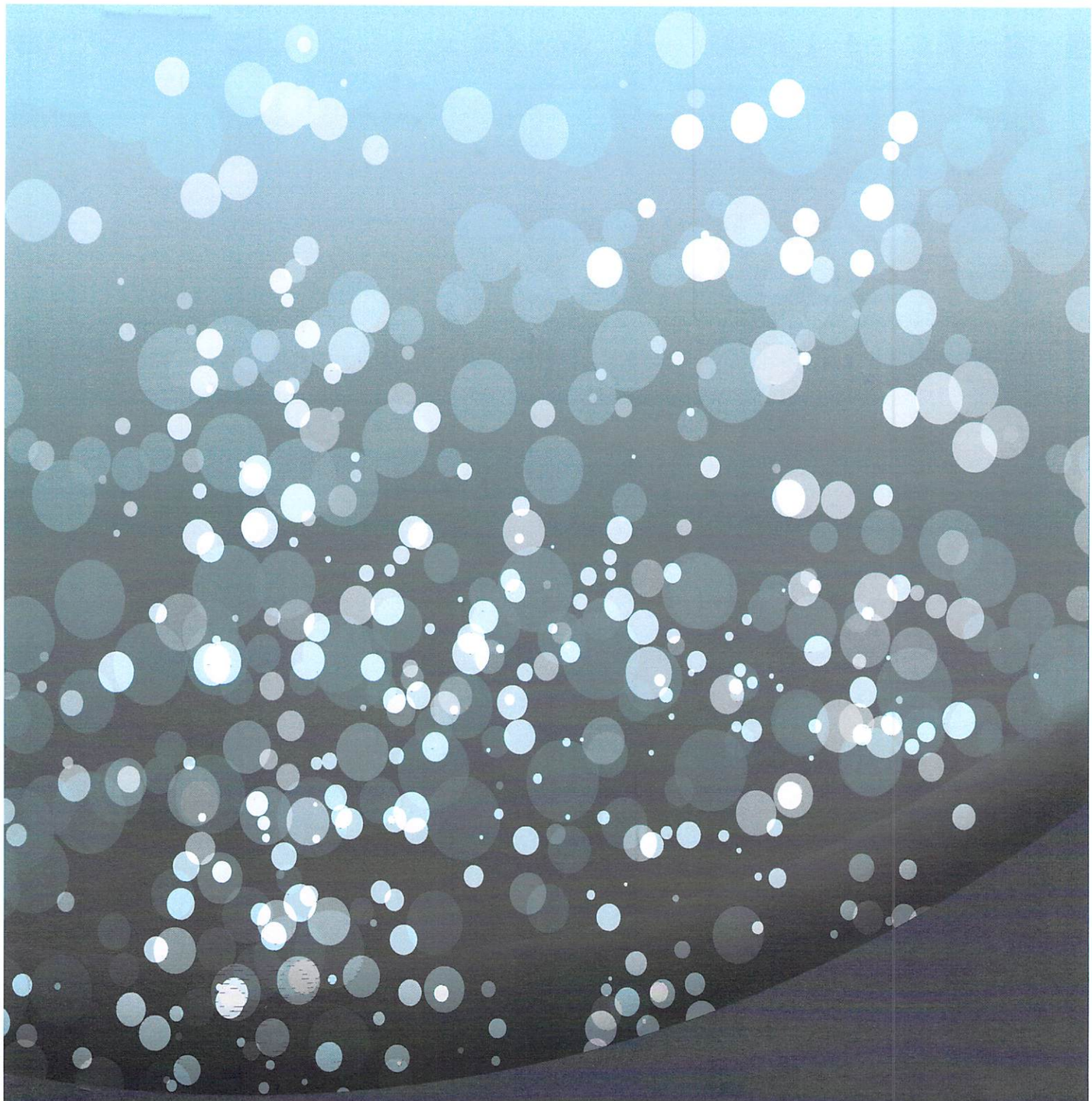

Kontrak Kinerja
KEMENKEU-*ONE*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2016

Kontrak Kinerja
Kemenkeu-*One*
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7/KK/2016
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2016

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

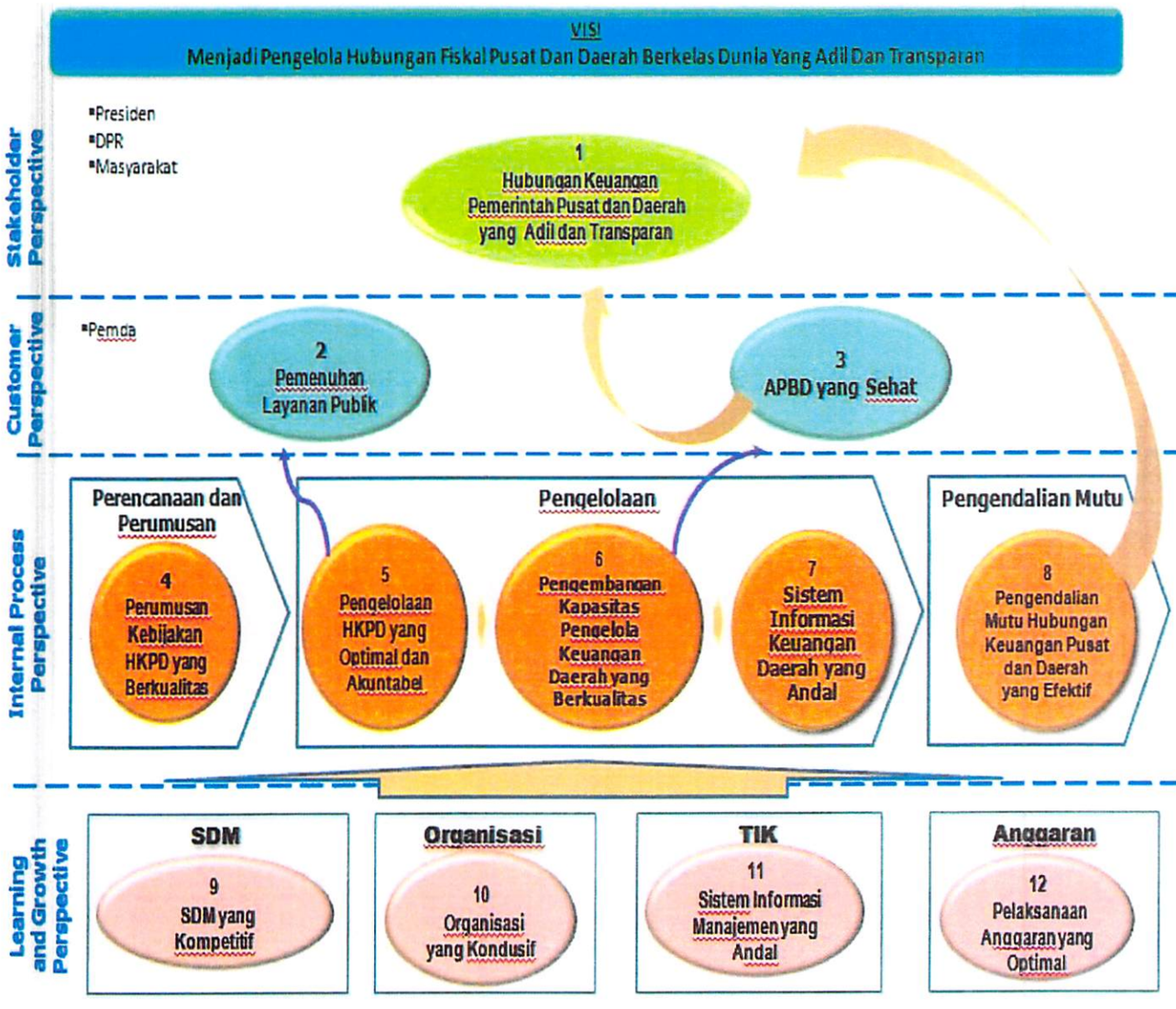

NS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan	1a-CP	Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah	0,725
		1b-N	Rasio PDRD terhadap PDRB	2
2.	Pemenuhan Layanan Publik	2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,30
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sehat	3a-N	Presentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat	75%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Berkualitas	4a-N	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas	100%
5.	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel	5a-N	Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan Terhadap Seluruh Alokasi DAK	75%
		5b-N	Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan	90%
		5c-N	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	5%
6.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang berkualitas	6a-N	Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah	50%
		6b-N	Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	100%
7.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Andal	7a-N	Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Yang Terintegrasi	100%
8.	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif	8a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	46%
		8b-N	Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda	100%
9.	SDM yang Kompetitif	9a-N	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	95%
10.	Organisasi yang Kondusif	10a-N	Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK	100%
11.	Sistem Informasi Manajemen yang Andal	11a-CP	Tingkat *Downtime* Sistem TIK	1%
		11b-N	Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu	100%
12	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%

NQ

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Rp48.791.732.000,00
2. Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp6.343.605.000,00
3. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp3.678.057.000,00
4. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	Rp13.795.901.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan	Rp61.031.872.000,00

Jakarta, Januari 2016

Menteri Keuangan,

Bambang P.S. Brodjonegoro

PNS yang dinilai,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan							
1a-CP	Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah	-	-	-	-	-	0,725	0,725 (skala 1)
1b-N	Rasio PDRD terhadap PDRB	-	2	2	-	2	2	2
2.	Pemenuhan Layanan Publik							
2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	-	-	4,30	4,30 (skala 5)
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sehat							
3a-N	Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat	-	-	-	-	-	75%	75%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas							
4a-N	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal dan akuntabel							
5a-N	Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap Seluruh Alokasi DAK	-	-	-	-	-	75%	75%
5b-N	Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan	-	35%	35%	40%	75%	15%	90%
5c-N	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

NP

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang berkualitas							
6a-N	Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah	-	-	10%	-	10%	40%	50%
6b-N	Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
7.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Andal							
7a-N	Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
8.	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif							
8a-N	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	16%	16%	-	16%	46%	46%
8b-N	Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	SDM yang Kompetitif							
9a-N	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	95%	95%	-	95%	95%	95%
10.	Organisasi yang Kondusif							
10a-N	Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK	-	-	-	-	-	100%	100%
11.	Sistem Informasi Manajemen yang Andal							
11a-N	Persentase *Downtime* Sistem TIK	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
11b-N	Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu	-	100%	100%	-	100%	100%	100%

NR

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12.	Pelaksanaan anggaran yang optimal							
12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	7%	25%	25%	65%	65%	95%	95%

Jakarta, Januari 2016

PNS yang dinilai,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Pengisian Formasi Jabatan Fungsional	1. Sosialisasi terkait Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2. Pengisian Formasi melalui Impassing dan Pengangkatan Pertama	Januari s.d. Desember 2016	Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	Perencanaan Penarikan Kas atas Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka CPIN *(Cash Planning Information Network)*	Pengajuan Perencanaan Penarikan Kas atas Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Januari s.d. Desember 2016	Direktorat Dana Perimbangan

Jakarta, Januari 2016

PNS yang dinilai,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Bambang P.S. Brodjonegoro	1	Nama	Boediarso Teguh Widodo
2	NIP	-	2	NIP	19580823 198210 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IVd
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Mewujudkan Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah	-	0,725 (skala 1)	100	12 bln	-
2.	Menghitung Rasio PDRD terhadap PDRB	-	2	100	12 bln	-
3.	Memenuhi Kepuasan Pengguna Layanan	-	4,30 (skala 5)	100	12 bln	-
4.	Menghitung Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat	-	75%	100	12 bln	-
5.	Menyelesaikan Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas	-	100%	100	12 bln	-
6.	Mengalokasikan DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap Seluruh Alokasi DAK	-	75%	100	12 bln	-
7.	Menyalurkan Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan	-	90%	100	12 bln	-
8.	Menjaga Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	-	5%	100	12 bln	-
9.	Melakukan Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In-House Training* dengan Pemerintah Daerah	-	50%	100	12 bln	-
10.	Melaksanakan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	-	100%	100	12 bln	-
11.	Melakukan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi	-	100%	100	12 bln	-
12.	Menindaklanjuti Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	-	46%	100	12 bln	-
13.	Memberikan Rekomendasi atas Evaluasi Raperda	–	100%	100	12 bln	-
14.	Memastikan Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	95%	100	12 bln	-
15.	Melakukan Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK	-	100%	100	12 bln	-
16.	Menjaga *Downtime* Sistem TIK	-	99%	100	12 bln	-

NG

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
17.	Mengembangkan Aplikasi Internal Tepat Waktu	-	100%	100	12 bln	-
18.	Melaksanakan Anggaran Berkualitas	-	95%	100	12 bln	-

Jakarta, Januari 2016

Menteri Keuangan,

Bambang P.S. Brodjonegoro

PNS yang dinilai,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One*
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode Kontrak Kinerja 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 yang meliputi:

1. Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah;
2. Rasio PDRD terhadap PDRB;
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan;
4. Presentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat;
5. Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas;
6. Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan Terhadap Seluruh Alokasi DAK;
7. Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan;
8. Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat;
9. Persentase Pemerintah Daerah yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *In-House Training;*
10. Persentase Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
11. Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi;
12. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti;
13. Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda;
14. Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;
15. Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK;
16. Persentase Downtime Sistem TIK;
17. Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu;
18. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2016

Manajer Kinerja Organisasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Negroho Iman Santosa
NIP. 19701231 199603 1 001

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1a-CP

Perspektif : *Stakeholder*

Sasaran Strategis : PK-1 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Deskripsi Sasaran Strategis: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya melalui pemberian pendanaan sesuai dengan prinsip money follows function. Pemberian pendanaan tersebut tentunya memperhatikan asas keadilan dan pemerataan yang mana merupakan tujuan dari HKPD itu sendiri, yakni mengurangi vertical dan horizontal imbalance. HKPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah sehingga prinsip keadilan dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama: 1a-CP Indeks pemerataan keuangan antar daerah

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

dan daerah yang disebabkan oleh tidak meratanya pelaksanaan
pembangunan antara lapisan masyarakat dan daerah.
Kesenjangan fiskal antar daerah diukur dengan menggunakan metode Williamson Index, sebagai berikut:

$$WI = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}}$$

Dimana :
Wi = Nilai / indeks ketimpangan wilayah / provinsi / kabupaten / kota
Yi = Pendapatan perkapita masing-masing provinsi / kabupaten / kota
Y = Total pendapatan perkapita kawasan indonesia
Fi = Jumlah penduduk masing-masing provinsi / kabupaten / kota
n = Jumlah penduduk Indonesia

Besarnya indeks kesenjangan fiskal (Vw) adalah 0 < Vw < 1
Vw = 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata
Vw = 1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna)
Vw~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata
Vw~1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Formula:

Indeks Kesenjangan Fiskal menggunakan Williamson Index

Tujuan:

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer daerah dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah.

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: ( ) Kuantitas ***(x) Kualitas*** ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ( ) Moderate ***(X) Low***

Tingkat Validitas IKU: ( ) Exact ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Direktorat Dana Perimbangan

Unit/Pihak Penyedia Data: Direktorat Dana Perimbangan

Sumber Data: Data pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson) dari BPS

Jenis Cascading IKU: ***(x) Cascading Peta*** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-*Cascading*

Metode Cascading: ***(X) Direct*** ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: ( ) *Sum* ( ) *Average* ***(X) Raw data***

Polarisasi Indikator Kinerja: ( ) Maximize ***(x) Minimize*** ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ***(X) Tahunan***

Konversi 120: ( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	0,76	0,73	0,74	0,724	0,725
Tahunan	0,76	0,73	0,74	0,724	0,725

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1b-N

Perspektif :	*Stakeholder*
Sasaran Strategis :	PK-1 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
Deskripsi Sasaran Strategis:	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya melalui pemberian pendanaan sesuai dengan prinsip money follows function. Pemberian pendanaan tersebut tentunya memperhatikan asas keadilan dan pemerataan yang mana merupakan tujuan dari HKPD itu sendiri, yakni mengurangi vertical dan horizontal imbalance. HKPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah sehingga prinsip keadilan dapat tercapai.
Indikator Kinerja Utama:	1b-N Rasio PDRD terhadap PDRB
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Rasio PDRD tahun berjalan terhadap PDRB tahun berjalan Non Migas diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi dengan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas **Formula:** Rasio PDRD terhadap PDRB = [(PDRD tahun berjalan) / (PDRB Non Migas Tahun Berjalan)] **Tujuan:** Mengukur nilai tambah penerimaan pajak dan retribusi dari seluruh kegiatan ekonomi non migas
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	(X) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU:	( ) High ( ) Moderate ***(X) Low***
Tingkat Validitas IKU:	( ) Exact ***(X) Proxy*** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Direktorat Pajak Derah dan Retribusi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pajak Derah dan Retribusi Daerah
Sumber Data:	Laporan Realisasi APBD untuk sumber data PDRD
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-*Cascading***
Metode Cascading:	***(X) Direct*** ( ) *Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) *Sum* ( ) *Average* ***(X) Raw data***
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ***(x) Semesteran*** ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					-
Triwulan II					2,00
Semester I					2,00
Triwulan III					-
Triwulan IV					2,00
Tahunan					2,00

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

2a-CP

Perspektif : *Customer*

Sasaran Strategis : PK-2 Pemenuhan Layanan Publik

Deskripsi Sasaran Strategis: Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Utama: 2a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Data capaian untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Humas. Lingkup survei adalah customers atas seluruh pelayanan Kementerian Keuangan kepada pihak eksternal.
IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Formula:

$$\sum_{1}^{n} \frac{Indeks\ Kepuasan\ Pengguna\ Layanan\ Es.I}{n}$$

Tujuan :

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Kemenkeu

Satuan Pengukuran: Indeks

Jenis Aspek Target Pada SKP: ( ) Kuantitas ***(X) Kualitas*** ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ( ) Moderate ***(X) Low***

Tingkat Validitas IKU: ***(X) Exact*** ( ) Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: DJPK

Unit/Pihak Penyedia Data: SETJEN

Sumber Data: Hasil survey pihak independen

Jenis Cascading IKU: **(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-*Cascading*

Metode Cascading: ( ) *Direct* **(X)** *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: ( ) *Sum* ( ) *Average* ***(X) Raw data***

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ***(X) Tahunan***

Konversi 120: ( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	4,08	4,37	4,20	4,27	4,30

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

3a-N

Perspektif : *Customer*

Sasaran Strategis PK-3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sehat

Deskripsi Sasaran Strategis APBD yang sehat tercermin dari beberapa kriteria APBD yang harus dipenuhi oleh suatu daerah.

Indikator Kinerja Utama: 3a-N Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Suatu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dikatakan memiliki APBD yang sehat jika memiliki hasil pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang minimum bernilai CC+ dan memperoleh opini BPK atas LKPD sekurang-kurangnya WDP. Pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dinilai dari kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; kinerja pelayanan dasar publik; dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
Dihitung berdasarkan rata-rata persentase jumlah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{\text{(jumlah provinsi yang memenuhi kriteria/jumlah provinsi)} + \text{(jumlah kabupaten yang memenuhi kriteria/jumlah kabupaten)} + \text{(jumlah kota yang memenuhi kriteria/jumlah kota)}}{3} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengetahui tingkat kinerja dan kesehatan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Iku ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektifitas kebijakan HKPD yang telah dibuat dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang akan dibuat.

Satuan Pengukuran: Persen

Jenis Aspek Target Pada SKP: ***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU: *( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Direktorat EPIKD

Unit/Pihak Penyedia Data: Direktorat EPIKD

Sumber Data: APBD dan Laporan APBD Pemerintah Daerah

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-*Cascading***

Metode Cascading: ***(X) Direct*** ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: **(X) *Sum*** ( ) *Average* ( ) *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ***(X) Tahunan***

Konversi 120: ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

4a-N

Perspektif:	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis	PK-4 Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis:	Kebijakan di bidang hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang berkualitas adalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterbitkan dan dapat diimplementasikan dengan baik yang memperlancar pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal.
Indikator Kinerja Utama:	4a-N Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Kebijakan yang direalisasikan adalah kebijakan hubungan antara pusat dan daerah yang berkualitas dan ditetapkan oleh pejabat terkait tepat waktu **Formula:** $\frac{\text{Jumlah kebijakan yang direalisasikan tepat waktu}}{\text{Jumlah kebijakan yang direncanakan}} \times 100\%$ **Tujuan:** IKU ini bertujuan untuk mengontrol ketepatan waktu produktifitas dan komitmen penyelesaian kebijakan dibidang hubungan keuangan pusat dan daerah.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU:	( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU:	*( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK
Sumber Data:	Peraturan terkait kebijakan dibidang hubungan antara pusat dan daerah
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(x) Non-*Cascading***
Metode Cascading:	*( ) Direct* ***(X) Indirect***
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* **(X) *Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	**(X) *Sum*** *( ) Average* *( ) Raw data*
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) *Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** *( ) Semesteran* ( ) Tahunan
Konversi 120:	***(x) Ya*** ( ) Tidak

Periode Pelaporan:

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan II	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan III	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan IV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tahunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

5a-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : PK-5 Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel

Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel secara umum dapat dicapai dengan meminimumkan vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance sehingga daerah mempunyai sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang tugas otonominya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal nasional.

Indikator Kinerja Utama: 5a-N Persentasi Alokasi DAK Infrastruktur, Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap seluruh alokasi DAK

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. IKU ini untuk mengukur besaran persentasi alokasi DAK Infrastruktur, Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap keseluruhan alokasi DAK Fisik. DAK Fisik dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas nasional yang dituangkan ke dalam RKP. DAK Fisik per daerah dialokasikan berdasarkan usulan daerah melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis terkait.

Formula:

$$\text{Rasio penetapan alokasi DAK sesuai dengan kriteria} = \frac{\text{Jumlah Alokasi DAK Infrastruktur, Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan}}{\text{Jumlah alokasi DAK Fisik}} \times 100\%$$

Tujuan:

Mengoptimalkan penetapan alokasi DAK yang berkualitas dan efisien sesuai dengan ketentuan perundangan untuk mendukung visi Pemerintah dalam Nawacita

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: ***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU: *( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Direktorat Dana Perimbangan

Unit/Pihak Penyedia Data: Direktorat Dana Perimbangan

Sumber Data: APBN, kesepakatan Panja, dan Kertas kerja perhitungan DAK

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(X) Non-Cascading***

Metode Cascading: ***(X) Direct*** ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) *Sum* ***(x) Average*** ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: **(X) *Sum*** ( ) *Average* ( ) *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) *Semesteran* ***(X) Tahunan***

Konversi 120: ( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

5b-N

Perspektif : *Stakeholder*

Sasaran Strategis : PK-5 Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel

Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel secara umum dapat dicapai dengan meminimumkan vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance sehingga daerah mempunyai sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang tugas otonominya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal nasional.

Indikator Kinerja Utama: 5b-N Persentase Penyaluran Dana Desa Berbasis pada Kinerja Penyerapan

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

konsep hasil penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan terdiri atas penyaluran dana desa setiap tahun TA 2016. Konsep hasil penyaluran tersebut menjadi bahan penyusunan perumusan kebijakan keuangan daerah khususnya mengenai kebijakan Dana Desa. ketepatan waktu penyaluran didasarkan pada dokumen pendukung dari para penyedia data dari Kabupaten/kota.

Formula:

$$\frac{\text{Realisasi penyaluran DIPA Dana Desa}}{\text{pagu alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

Tujuan:

mempercepat penyaluran Dana Desa, sesuai dengan persyaratan penyaluran sebagaimana tercantum dalam PMK. Serta menghindari penundaan dan/atau pemotongan Dana Desa.

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: ***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU: *( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Direktorat Dana Perimbangan

Unit/Pihak Penyedia Data: Direktorat Dana Perimbangan

Sumber Data: Kabupaten/Kota Penerima Dana Desa

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(X) Non-Cascading***

Metode Cascading: ***(X) Direct*** ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) Sum ( ) *Average* ***(x) Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: **(X) *Sum*** ( ) *Average* ( ) *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) *Semesteran* ( ) Tahunan

Konversi 120: ( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	35%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	15%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

5c-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : PK-5 Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang Optimal dan Akuntabel secara umum dapat dicapai dengan meminimumkan vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance sehingga daerah mempunyai sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang tugas otonominya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal nasional.

Indikator Kinerja Utama : 5c-N Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

Deskripsi :

Definisi:

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah gap antara perkiraan/proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, DJPK memiliki keterkaitan pada Pengeluaran Kas yang meliput transfer ke daerah dan dana desa sesuai yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan.
Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat dieksekusi.

Unit eselon I wajib menyampaikan data proyeksi satu tahun yang dirinci dalam bulanan kepada Tim CPIN paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal tahun berjalan melalui surat. Apabila unit tidak menyampaikan proyeksi bulanan, maka data proyeksi yang diambil adalah proyeksi yang disampaikan pada awal tahun sebagai dasar perhitungan capaian IKU.pada bulan berjalan.
Dalam satu bulan tim CPIN dapat melakukan rapat sebanyak 2 kali. Jika ada perbaikan, unit dapat menyampaikan data kepada Tim CPIN melalui surat paling lambat 2 hari sebelum rapat CPIN pertama (minggu pertama bulan berjalan).
Jika ada perbaikan kembali, unit eselon I dapat memberikan data proyeksi kepada Tim CPIN melalui surat paling lambat 2 hari sebelum rapat CPIN kedua (minggu ketiga bulan berjalan) yang dijadikan sebagai acuan perhitungan proyeksi untuk perhitungan capaian IKU.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 5%.

Formula:

Deviasi pengeluaran Kas

$$\text{Deviasi bulan (m)} = \frac{\text{Proyeksi pengeluaran kas- Realisasi pengeluaran kas}}{\text{Proyeksi pengeluaran kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi pengeluaran kas} = \frac{\text{Deviasi bulan (m) + Deviasi bulan (m+1) + Deviasi bulan (m+2)}}{3}$$

Deviasi perencanaan Kas pada DJPB (gabungan seluruh Eselon I)

$$\text{Deviasi Perencanaan Kas} = \frac{\text{Deviasi proyeksi Penerimaan Kas + Deviasi Proyeksi Pengeluaran Kas}}{2} \times 100\%$$

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk merefleksikan sejauh mana gap penyimpangan antara realisasi dan proyeksi perencanaan kas.

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP : ***(x) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ***(x) Low***

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact ***(x) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data : Tim CPIN (DJP, DJBC, DJA, DJPK, DJKN, dan DJPU) dan satker dengan pagu besar (> Rp. 1 Triliun)

Sumber Data : Aplikasi CPIN berbasis Web, Aplikasi Perencanaan Kas

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(x) Non-Cascading***

Metode Cascading : ***(x) Direct*** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ***(x) Average*** ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ***(x) Raw data***

Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ***(x) Minimize*** ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ***(x) Triwulanan*** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya ***(x) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	5%
Triwulan II	-	-	-	-	5%
Triwulan III	-	-	-	-	5%
Triwulan IV	-	-	-	-	5%
Tahunan	-	-	-	-	5%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

6a-N

Perspektif : *Internal Process Perspectif*

Sasaran Strategis : PK-6 Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis : Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka perlu ada upaya peningkatan pemahaman stakeholders akan fungsi DJPK. Bentuk peningkatan pemahaman stakeholders dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Indikator Kinerja Utama : 6a-N Persentase Kerjasama Penyelenggaraan *In House Training* oleh Pemerintah Daerah

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Merupakan persentase tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam kerja sama penyelenggaraan pelaksanaan *In-House Training*

Formula:

$$\text{\% Kerja Sama Penyelenggaraan IHT} = \frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam kerja sama penyelenggaraan IHT}}{\text{542 Pemerintah Daerah}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengetahui tingkat kerjasama penyelenggaraan pelaksanaan IHT sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari stakeholders terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: ***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High ( ) Moderate ***(X) Low***

Tingkat Validitas IKU: *( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Unit/Pihak Penyedia Data: Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Sumber Data: Laporan Pelaksanaan IHT Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(X) Non-Cascading***

Metode Cascading: ***(x) Direct*** ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) Sum ( ) *Average* ***(x) Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: ( ) *Sum* ( ) *Average* ***(X) Raw data***

Polarisasi Indikator Kinerja: (X) ***Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan () Triwulanan ***(X) Semesteran*** ( ) Tahunan

Konversi 120: ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Semester I	n/a	n/a	n/a	n/a	10%
Semseter II	n/a	n/a	n/a	n/a	40%
Tahunan	n/a	n/a	n/a	n/a	50%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

6b-N

Perspektif :	*Internal Process Perspectif*
Sasaran Strategis :	PK-6 Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis :	Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka perlu ada upaya peningkatan pemahaman stakeholders akan fungsi DJPK. Bentuk peningkatan pemahaman stakeholders dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.
Indikator Kinerja Utama :	6b-N Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** IKU ini menggambarkan tingkat pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah **Formula:** **20% inpassing di djpk** **50% pengangkatan di djpk** **70% penyusunan kamus kompetensi** **100% penyusunan kurikukum diklat AKPD** **Tujuan:** IKU ini bertujuan untuk menggambarkan progress pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU:	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU:	***(X) Exact*** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan
Sumber Data:	Peraturan Pelaksanaan Jabatan Fungsional AKPD
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-*Cascading*
Metode Cascading:	**(X) *Direct*** ( ) *Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) *Sum* ***(X) Average*** ( ) *Raw data*
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	70%
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

7a-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	PK - 7 Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Andal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Ketersediaan data dan informasi yang memenuhi prinsip TRUST (CompleTe, Reliable, Up-to-date, Secure, accuraTe) adalah hal yang sangat penting. Tidak saja dalam proses penyusunan/perumusan kebijakan tapi juga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu, perwujudan
Indikator Kinerja Utama:	7a-N Persentase Pengembangan dan Implementasi SIKD yanng Terintegrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Pengembangan SIKD secara komprehensif dan menyeluruh menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan data dan laporan baik di tingkat manajemen puncak maupun operasional. Program pengembangan SIKD dengan pendekatan pengembangan sistem secara holistik dimulai sejak September 2015. Agar pengembangan SIKD dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan berkesinambungan, telah disusun Roadmap Pengembangan SIKD 2015–2019. Sesuai dengan roadmap, pada tahun 2016 akan dilakukan implementasi SIKD yang telah dikembangkan pada tahun 2015. Selain itu akan dilakukan pengembangan lebih lanjut pada SIKD agar kedepannya dapat tercapai SIKD Nasional yang mampu menyajikan IKD sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat. **Formula:** **Persentase tahapan pembangunan dan implementasi SIKD SIKD** **Semester I (50%)** **1. Terselenggaranya Piloting SIKD di 14 Pemerintah Daerah (10%)** **2. Terselenggaranya Rollout SIKD berupa Bimtek kepada 175 Pemerintah Daerah (10%)** **3. Pengembangan Dashboard SIKD (15%)** **4. Pengembangan SIMPATIK SIKD (15%)** **Semester 2 (50%)** **1. Terselenggaranya Rollout SIKD berupa Bimtek kepada 175 Pemerintah Daerah (10%)** **2. Piloting Service Level Agreement (SLA) SIKD Nasional dengan 3 Pemerintah Daerah (10%)** **4. Pengembangan SINERGI (15%)** **5. Tersedianya Peraturan Menteri Keuangan Penyelenggaraan SIKD (15%)** **Tujuan:** IKU ini bertujuan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan implementasi dan System Enhancement SIKD berdasarkan Roadmap SIKD
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU:	( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU:	*( ) Exact* ***(X) Proxy*** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Direktorat EPIKD
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat EPIKD
Sumber Data:	Dokumen Design
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-*Cascading***
Metode Cascading:	***(X) Direct*** ( ) *Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) *Sum* **(X) *Average*** ( ) *Raw data*
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan **(X) Semesteran** ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Semester I	-	-	-	-	50%
Semester II	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 8a-N
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : PK-8 Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengawasan, Pengamatan, Pengecekan dengan Cermat, dan Pemantauan Pekerjaan agar Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

Indikator Kinerja Utama : **8a-N Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK adalah *progres* tindak lanjut yang dilakukan oleh unit Eselon II atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan *action plan* dan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK berdasarkan hasil pembahasan empat pihak antara DJPB, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.

b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan "Sesuai" oleh BPK dalam LHP.

Sub IKU ini mengukur penyelesaian rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap LKPP dan LK BUN yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit eselon II terkait.

Formula:

Semester I

Capaian = $\left(\left(\frac{a}{b} \times 50\%\right) + \left(\frac{c}{f} \times 50\%\right)\right)$

Semester II

Capaian = $\frac{\left(\left(\frac{a}{b} \times 50\%\right) + \left(\frac{c}{d + (b - a)} \times 50\%\right)\right) + \left(\left(\frac{e}{f} \times 50\%\right) + \left(\frac{g}{h + (f - e)} \times 50\%\right)\right)}{2}$

Keterangan:

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2015" yang
b = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun
c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP yang diusulkan selesai dalam tahun 2016
d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP LKPP 2015
e = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun 2015" yang
f = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun
g = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP BUN yang diusulkan selesai dalam tahun 2016
h = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP BUN 2015
Catatan: Dalam LHP tindaklanjut LKPP/LK BUN sudah terangkum rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan tindaklanjut rekomendasi BPK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target : ***(x) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ***(x) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact ***(x) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Seluruh Unit Eselon I

Unit/Pihak Penyedia Data : DJPB dan Itjen

Sumber Data : Tindak lanjut rekomendasi BPK dari Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan entitas pelaporan lainnya

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(x) Non-Cascading***

Metode Cascading : ( ) Direct ***(x) Indirect***

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ***(x) Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi : ***(x) Sum*** ( ) Average ( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : ***(x) Maximize*** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ***(x) Semesteran*** ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya ***(x) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Semester I					16,00%
Semester II					46,00%
Tahunan					46,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

8b-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : PK-8 Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Pemgawasan, Pengamatan, Pengecekan dengan Cermat, dan Pemantauan Pekerjaan agar Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

Indikator Kinerja Utama : 8b-N Persentase rekomendasi atas evaluasi Raperda PDRD

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Ukuran untuk mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD yang telah dievaluasi berdasarkan UU No.28 tahun 2009

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Evaluasi Raperda PDRD yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah Evaluasi Raperda PDRD yang diterima dari Kemen}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

Mengetahui tingkat penyelesaian rekomendasi evaluasi raperda

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target : ***(x) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ***(x) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact ***(x) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Unit/Pihak Penyedia Data : Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Data : Matriks Evaluasi Raperda

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(x) Non-Cascading***

Metode Cascading : ***(X) Direct*** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ***(X) Average*** ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ***(X) Average*** ( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : ***(x) Maximize*** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya ***(x) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan II	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan III	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
Triwulan IV	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
Tahunan	-	-	100,00%	100,00%	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

9a-N

Perspektif : *Learning and Growth*

Sasaran Strategis : PK-9 SDM yang kompetitif

Deskripsi Sasaran Strategis : SDM yang kompetitif dan berkompetensi tinggi adalah SDM Kementerian Keuangan yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik hard maupun soft competencies.

Indikator Kinerja Utama : 9a-N Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (indeks kesesuaian min 72%)

1. SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah Jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan
2. Job Person Match adalah Indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ

$$\text{JPM} = \left\{ \sum \left(\frac{\text{Level kompetensi pejabat}}{\text{Standar Kompetensi Jabatan}} \right) : \sum \text{Kompetensi dalam SKJ} \right\} \text{X100\%}$$

Contoh perhitungan:

JPM pejabat A = { (5/5 + 6/8 + 7/8 + 5/4 + 5/8 + 8/8 + 4/5 + 7/8 + 6/8) / 9 } x 100%
= { (317/40) / 9 } x 100%
= 88%

Pejabat A telah memenuhi SKJ

Setjen (Biro SDM) menyediakan data JPM eselon II dan III masing-masing unit eselon I. Data JPM eselon IV disediakan oleh Bagian Kepegawaian masing-masing unit eselon I

Pada laporan capaian, diinformasikan juga capaian IKU pada setiap level jabatan (eselon II, III, dan IV)

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJPK yang telah memenuhi kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJPK yang telah mengikuti assessment}} \times 100\%$$

Tujuan:

Tersedianya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target : ***(x) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ***(x) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact ***(x) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : DJPK

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal (Biro SDM) untuk hasil assessment pada pejabat eselon II dan III

Sumber Data : Hasil assessment center pejabat eselon II, III, IV

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(x) Non-Cascading***

Metode Cascading : ***(X) Direct*** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ***(X) Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi : ***(X) Sum*** ( ) Average ( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : ***(x) Maximize*** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya ***(x) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					-
Triwulan II	88,00%	95,00%	95,00%	96,88%	95,00%
Semester I	88,00%	95,00%	95,00%	96,88%	95,00%
Triwulan III					-
Triwulan IV	88,00%	95,00%	95,00%	94,44%	95,00%
Tahunan	88,00%	95,00%	95,00%	94,44%	95,00%

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

10a-N

Perspektif:	*Learning and Growth*
Sasaran Strategis:	PK-10 Organisasi yang kondusif
Deskripsi Sasaran Strategis:	Organisasi yang kondusif adalah organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama:	10a-N Persentase Integrasi Transformasi Kelembagaan DJPK dalam Transformasi Kelembagaan Kemenkeu
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Pelaksanaan integrasi Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan DJPK ke dalam program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu **Formula:** Munculnya Inisiatif Strategis terkait Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu **Tujuan:** Memperkuat Peran Strategis yang dimiliki DJPK dalam mengelola Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target :	***(x) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High ***(x) Moderate*** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact ***(x) Proxy*** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Sekretariat DJPK
Unit/Pihak Penyedia Data :	Sekretariat DJPK
Sumber Data :	Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kemenkeu
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(X) Non-Cascading***
Metode Cascading :	***(X) Direct*** ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya **(X) Tidak**

Periode Pelaporan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

11a-CP

Perspektif : *Learning and Growth Perspektif*

Sasaran Strategis : **PK-11 Sistem Manajemen Informasi yang Andal**

Deskripsi Sasaran Strategis : Sistem Informasi Manajemen yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Indikator Kinerja Utama : 11a-CP Tingkat *downtime* sistem TIK

Deskripsi :

Definisi:

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK meliputi: Layanan Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kemenkeu;dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive Maintenance).

Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.

Laporan downtime layanan TIK disusun berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati. K.

Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah: *website* DJPK dan layanan SIKD.

Formula:

$$\textit{Downtime}\ \text{Sistem TIK} = \frac{\text{Jumlah downtime seluruh layanan TIK}}{\text{Jumlah layanan TIK}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin.

Satuan Pengukuran : Persen

Jenis Aspek Target pada SKP : ( ) Kuantitas/Output ***(X) Kualitas/Mutu*** ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact ***(X) Proxy*** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit TIK Eselon I Terkait

Unit/Pihak Penyedia Data : Unit TIK Eselon I Terkait

Sumber Data : Laporan Downtime Layanan TIK

Jenis Cascading IKU: ***(X) Cascading Peta*** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct ***(X) Indirect***

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ***(X) Average*** ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ***(X) Raw data***

Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ***(X) Minimize*** ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya ***(X) Tidak***

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	*1%*
Triwulan II	-	-	-	-	*1%*
Triwulan III	-	-	-	-	*1%*
Triwulan IV	-	-	-	-	*1%*
Tahunan	-	-	-	-	*1%*

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

11b-N

Perspektif :	*Learning and Growth*
Sasaran Strategis :	PK-11 Sistem Manajemen Informasi yang Andal
Deskripsi Sasaran Strategis :	Sistem Informasi Manajemen yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).
Indikator Kinerja Utama :	11b-N Persentase pengembangan aplikasi internal tepat waktu
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Kinerja yang dihasilkan meliputi proses pembangunan/ pengembangan aplikasi internal di Ditjen Perimbangan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan Perencanaan yang telah dibuat untuk masing-masing aplikasi. **Formula:** **Persentase Ketepatan Waktu Pengembangan Aplikasi Internal** $formula = \frac{\sum Pengembangan\ Aplikasi\ Selesai\ Tepat\ Waktu}{\sum Pengembangan\ Aplikasi\ Jatuh\ Tempo\ Sebelum\ Periode\ Pelaporan\ IKU} \times 100$ * Kriteria tepat waktu adalah proses pengembangan/pembangunan diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang dibuat dan disetujui bersama-sama pemilik proses bisnis. **Tujuan:** Untuk mengukur ketepatan waktu pembangunan/pengembangan aplikasi internal.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	***(X) Kuantitas*** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU:	( ) High ***(X) Moderate*** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU:	***(X) Exact*** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Direktorat EPIKD
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat EPIKD
Sumber Data:	Masukan/Permintaan atas Kebutuhan Aplikasi dari Setiap Unit DJPK
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ***(X) Non-Cascading***
Metode Cascading:	***(X) Direct*** ( ) *Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) *Sum* **(X) *Average*** ( ) *Raw data*
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014	2015		2016
	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	25%	25%	25%	-
Triwulan II	50%	50%	50%	100%
Semester I				100%
Triwulan III	75%	75%	75%	-
Triwulan IV	100%	100%	100%	100%
Tahunan	100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

12a-N

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : PK-12 Pelaksanaan anggaran yang optimal

Deskripsi Sasaran Strategis :
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

Indikator Kinerja Utama : 12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Deskripsi :

Definisi:
Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas dua komponen, yaitu:
a) penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU).
b) Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan/belanja lainnya.
c) pencapaian output: Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada SE-7/MK.1/2014 tentang tata cara pengukuran IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kemenkeu. Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi monev kinerja penganggaran

Formula:
Diukur sesuai dengan Surat Edaran Menkeu Nomor SE-32/MK.1/2015, sbb:

$$Indeks = (Penyerapan\ Anggaran\ x\ 11,86\%) + (Nilai\ Efisiensi\ x\ 34,96\%) + (Realisasi\ Output\ x\ 53,18\%)$$

Nilai Efisiensi = 0,80 + [(Realisasi Kontrak) / (Pagu Kontrak - Realisasi Kontrak)] x 100%

Dalam hal Satker tidak memiliki pagu kontrak, bobot IKU adalah:
Penyerapan anggaran: 29,34%
Pencapaian keluaran: 70,66%

Tujuan:
Mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian output

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU: ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU: ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Sekretariat Direktorat Jenderal

Unit/Pihak Penyedia Data: Sekretariat Direktorat Jenderal

Sumber Data: Laporan realisasi anggaran Kementerian Keuangan

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-*Cascading***

Metode Cascading: ( ) *Direct* ( ) *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) *Sum* ( ) *Average* **(X) *Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: ( ) *Sum* **(X) *Average*** ( ) *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) *Maximize*** ( ) *Minimize* ( ) *Stabilize*

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ***(X) Triwulanan*** ( ) Tahunan

Konversi 120: ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2014		2015		2016
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	10%	7,35%	10%	11,25%	7%
Triwulan II	28%	32,08%	28%	29,95%	25%
Triwulan III	54%	63,45%	54%	54,27%	65%
Triwulan IV	95%	95,36%	95%	96,00%	95%
Tahunan	95%	95,36%	95%	96,00%	95%

Matriks *Cascading*
Kemenkeu-*One* ke Kemenkeu-*Two*
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

MATRIKS *ALIGNMENT* IKU KEMENKEU-ONE KE KEMENKEU-TWO 2016

UNIT ESELON I: DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kemenkeu-One						Kemenkeu-Two								
						SS		IKU						
Kode SS	SS	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode UIC	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode UIC	PIC Eselon II (Lama)	Kode UIC Pasca Reor	Eselon II Pasca Reor
1	HKPD yang adil dan transparan	1a-CP	Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah	0,725	2	1	HKPD yang adil dan transparan	1a-CP	Indeks pemerataan kemampuan keuangan antardaerah	0,725	2	Daper	2	Daper
		1b-N	Rasio PDRD terhadap PDRB	2	3	1	HKPD yang adil dan transparan	1a-CP	Rasio PDRD terhadap PDRB	2	3	PDRD	3	PKKD
2	Pemenuhan Layanan Publik	2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,3	1	1	Pemenuhan Layanan Publik	1a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,3	1	Sekretariat	1	Sekretariat
					2	2	Pemenuhan Layanan Publik	2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,3	2	Daper	2	Daper
					4	2	Pemenuhan Layanan Publik	2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,3	4	PKD	4	PTNDP
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sehat	3a-N	Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat	**75%**	5	3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sehat	3a-N	Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat	**75%**	5	EPIKD	5	EPIKD
4	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang	4a-N	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	1	2	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	2a-CP	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	1	Sekretariat	1	Sekretariat
					2	3	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	3a-CP	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	2	Daper	2	Daper
					3	2	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	2a-CP	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	3	PDRD	3	PKKD
					4	2	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)	2a-CP	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	4	PKD	4	Pembiayaan & Transfer Non Dana Perimbangan
					5	4	Perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	4a-CP	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas	100%	5	EPIKD	5	EPIKD
5	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal dan akuntabel	5a-N	Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap Seluruh Alokasi DAKh	75%	2	4	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal dan akuntabel	4a-CP	Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap Seluruh Alokasi DAKh	75%	2	Daper	2	Daper
		5b-N	Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan	90%	2	4	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal dan akuntabel	4b-CP	Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan	90%	2	Daper	4	Pembiayaan & Transfer Non Dana Perimbangan
		5c-N	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	5%	2	4	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal dan akuntabel	4c-CP	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	5%	2	Daper	4	Pembiayaan & Transfer Non Dana Perimbangan
6	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang berkualitas	6a-N	Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah	50%	4	6	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang berkualitas	6a-CP	Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah	50%	4	PKD	3	PKKD
		6b-N	Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	100%	1	5	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang berkualitas	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	100%	1	Sekretariat	1	Sekretariat

MATRIKS *ALIGNMENT* IKU KEMENKEU-ONE KE KEMENKEU-TWO 2016

UNIT ESELON I: DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kemenkeu-One						Kemenkeu-Two							
						SS		IKU					
Kode SS	SS	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode UIC	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode UIC	PIC Eselon II (Lama)	Kode UIC Pasca Reor	Eselon II Pasca Reor
7	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Andal	7a-N	Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi	100%	5	7	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Andal	7a-CP	Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi	100%	5	EPIKD	5	EPIKD
8	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif	8a-N	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	**46%**	1	8	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	**46%**	1	Sekretariat	1	Sekretariat
					5	7	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif	7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	**46%**	5	EPIKD	4	Pembiayaan & Transfer Non Dana Perimbangan
		8b-N	Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda	100%	3	4	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Efektif	4a-CP	Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda	100%	3	PDRD	3	PKKD
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	95%	1	9	SDM yang kompetitif	9a-CP	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	95%	1	Sekretariat	1	Sekretariat
10	Organisasi yang kondusif	10a-N	**Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK**	100%	1	10	Organisasi yang kondusif	10a-CP	**Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK**	100%	1	Sekretariat	1	Sekretariat
11	Sistem Informasi Manajemen yang Andal	11a-N	**Tingkat Downtime Sistem TIK**	1%	5	9	Sistem Informasi Manajemen yang Andal	9a-CP	**Tingkat Downtime Sistem TIK**	1%	5	EPIKD	5	EPIKD
		11b-N	**Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu**	100%	5	9	Sistem Informasi Manajemen yang Andal	9b-CP	**Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu**	100%	5	EPIKD	5	EPIKD
12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-N	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95%	1	12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	1	Sekretariat	1	Sekretariat
					2	7	Pelaksanaan anggaran yang optimal	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	2	Daper	2	Daper
					3	5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	3	PDRD	3	PKKD
					4	9	Pelaksanaan anggaran yang optimal	9a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	4	PKD	4	Pembiayaan & Transfer Non Dana Perimbangan
					5	12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	5	EPIKD	5	EPIKD

Addendum Kontrak Kinerja
Kemenkeu-*One*
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA - 10710
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 350844, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-506/PK.1/2016 12 Oktober 2016
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) *In House Training* pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta.

Sehubungan dengan adanya kebijakan *self blocking* untuk penghematan pagu anggaran di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. IKU "Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pelaksanaan *In House Training* oleh Pemerintah Daerah" dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki target pelaksanaan sebesar 50% dari total pemda yang ada di Indonesia (272 Pemerintah Daerah) dengan alokasi dana penyelenggaraan sebesar Rp10.912.524.000 pada DIPA awal tahun anggaran 2016;
2. Usulan revisi target IKU yang diajukan adalah menjadi sejumlah 100 daerah (18,45% dari jumlah seluruh Pemda), hal ini disesuaikan dengan ketersediaan alokasi dana kegiatan setelah kebijakan *self blocking*, yaitu sebesar Rp1.706.690.000 (16% dari pagu awal). Sebagai informasi realisasi IKU *In House Training* hingga semester II adalah sebesar 11,81% dari target IKU sebesar 50% untuk tahun 2016;
3. Mengingat pentingnya hal tersebut, bersama ini kami mengajukan revisi target IKU *In House Training* tersebut pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Putut Hari Satyaka
NIP 19730709 199803 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8-10, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 PES. 6248; FAKSIMILI (021) 385-2146; SITUS www.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 505 /SJ.1/2016 18 Oktober 2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : *Addendum* Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-*One* DJPK Tahun 2016

Yth. Sekretaris DJPK
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara No. S-506/PK.1/2016 tanggal 12 Oktober 2016 hal Permohonan Revisi IKU *In-House Training* pada KK Kemenkeu-*One* DJPK Tahun 2016, dan setelah dilakukan penelaahan terhadap permohonan *addendum* Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-*One* DJPK Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, mengingat batas waktu penyampaian *addendum* KK paling lambat tanggal 18 Oktober tahun berjalan, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep *Addendum* Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJPK untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan diajukan kembali kepada kami untuk mendapat penetapan Menteri Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Moh. Hatta
NIP 19580324 197911 1 001

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA - 10710
TELEPON (021) 3508442, FAKSIMILE (021) 350944, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 3 /PK.14/2016 19 Oktober 2016
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian *Addendum* Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta.

Sehubungan dengan surat Bapak nomor: S-505/SJ.1/2016 tanggal 18 Oktober 2016 hal *Addendum* Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan dokumen *Addendum* Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
Selaku Manajer Kinerja Organisasi,

Nugroho Iman Santosa
NIP 19701231 199603 1 001

ADDENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7A/KK/2016

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: 7/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016, berupa perubahan IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelumnya:
   IKU 6a-N "Persentase kerjasama penyelenggaraan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah" dengan target akhir tahun sebesar 50%, dengan rincian target:

Target						
Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-	10%	10%	-	10%	40%	50%

2. Menjadi:
   IKU 6a-N "Persentase kerjasama penyelenggaraan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah" dengan target total akhir tahun sebesar 18,45%, dengan rincian target:

Target						
Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-	10%	10%	-	10%	8,45%	18,45%

Jakarta, 2016

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001

ADDENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7A/KK/2016

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: 7/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016, berupa perubahan IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelumnya:
   IKU 6a-N "Persentase kerjasama penyelenggaraan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah" dengan target akhir tahun sebesar 50%, dengan rincian target:

Target						
Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-	10%	10%	-	10%	40%	50%

2. Menjadi:
   IKU 6a-N "Persentase kerjasama penyelenggaraan *In-House Training* oleh Pemerintah Daerah" dengan target total akhir tahun sebesar 18,45%, dengan rincian target:

Target						
Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-	10%	10%	-	10%	8,45%	18,45%

Jakarta, 2016

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001

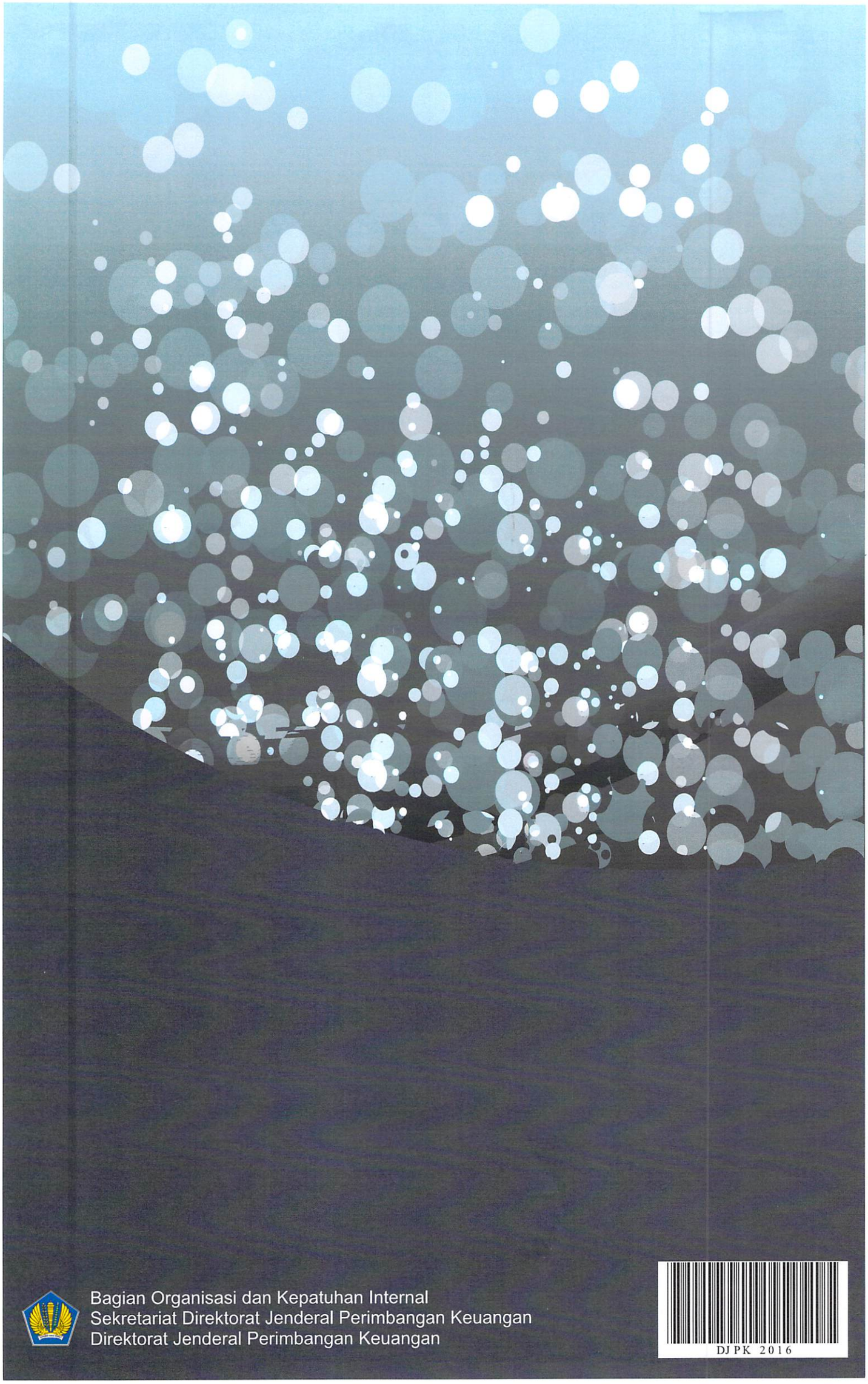

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DJPK 2016